

DINAMIKA PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN ETIKA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN ZAMAN

Nabila, Ario Pamungkas, Alhumaira Hasyasyah Hafizh, Nailla Putri Ramadhani,
Namira Azkia Bahar
Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Esa Unggul Bekasi
E-mail: nailaramadani574@student.esaunggul.ac.id

Abstract

Pancasila provides both a philosophical foundation for state governance and a moral compass for societal life. This article aims to examine the dynamics of Pancasila in addressing the challenges of globalization, technological advancements, and complex social changes. The findings reveal that while Pancasila remains relevant, its implementation often faces obstacles such as shifting social values, individualism, economic disparities, and moral crises. These challenges are further exacerbated by globalization, which introduces foreign values that may dilute Pancasila's essence. Nevertheless, Pancasila retains significant potential to serve as a robust foundation for fostering a just and civilized society, provided that its values are reinforced through character education, public policy, and transparent governance..

Keywords: Pancasila, philosophical system, ethics, globalization, social challenges

Abstrak

Pancasila tidak hanya memberikan dasar filosofis bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang kompleks. Kajian ini menemukan bahwa meskipun Pancasila tetap relevan, penerapannya sering kali menghadapi hambatan seperti pergeseran nilai sosial, individualisme, ketimpangan ekonomi, dan krisis moralitas. Hambatan ini diperburuk oleh arus globalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang dapat mereduksi esensi nilai-nilai Pancasila. Pancasila tetap memiliki potensi besar untuk menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab, dengan syarat dilakukannya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, kebijakan publik, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih.

Kata kunci : Pancasila, sistem filsafat, etika, globalisasi, tantangan sosial

Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada (Pramita et al., 2024). Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila menyatukan beragam nilai yang berasal dari budaya, sejarah, serta karakter bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat, tantangan terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila semakin besar (Syafira et al., 2024). Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Amri, 2018).

Dalam perkembangan zaman, Pancasila harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan, memiliki relevansi yang sangat besar dalam menghadapi isu-isu kontemporer (Safitri, 2021). Dalam menghadapi kemajuan teknologi, pergeseran moralitas, dan tantangan globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila bisa mengalami distorsi jika tidak dipahami dengan tepat. Misalnya, dalam ranah politik dan ekonomi, perkembangan zaman seringkali membawa ketimpangan sosial dan kesenjangan yang semakin melebar, yang berpotensi mengancam keadilan

sosial dan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila (Alhudawi, 2023).

Selain itu, dalam melihat Pancasila sebagai sistem filsafat, kita juga perlu mengkaji hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan etika dan moral dalam masyarakat Indonesia. Etika sebagai bagian dari filsafat moral sangat terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, sering kali ditemukan berbagai perilaku yang bertentangan dengan etika Pancasila, seperti korupsi, ketidakadilan, dan intoleransi. Dalam menghadapi fenomena tersebut, Pancasila harus terus dijadikan sebagai landasan moral yang mengarahkan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan (Syafira et al., 2024).

Pancasila, sebagai sistem filsafat dan etika, harus mampu menjadi filter dalam menghadapi arus perubahan yang ada. Di tengah berkembangnya individualisme dan materialisme yang semakin merambah kehidupan, nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila harus terus diperkuat. Tanpa adanya penguatan terhadap nilai-nilai tersebut, akan sulit bagi masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kerukunan dan solidaritas di tengah kemajuan zaman.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis, Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara memegang peranan yang sangat penting. Sebagai sistem filsafat dan etika, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan politik dan sosial di Indonesia, tetapi juga sebagai landasan moral yang mengarahkan tindakan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin kompleks, Pancasila menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi dan keberlanjutannya.

Pancasila sebagai sistem filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat sebagai pandangan hidup yang bersifat holistik dan terintegrasi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia (Amri, 2018). Filsafat Pancasila tidak hanya sekadar rumusan norma atau prinsip dasar negara, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yang berpijak pada filsafat manusia, etika, dan politik. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengajarkan tentang keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta penekanan pada penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki hak asasi yang harus dijaga dan dihormati. Ini menunjukkan bahwa Pancasila

mengandung dimensi metafisik, etis, dan sosial yang saling berhubungan satu sama lain dalam mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara (Alhudawi, 2023).

Di dalam kerangka filsafat, Pancasila tidak hanya dilihat sebagai serangkaian nilai normatif, tetapi juga sebagai suatu pandangan dunia yang mampu memberikan arah dan tujuan hidup berbangsa (Amri, 2018). Pancasila memberikan dasar filosofis yang mendalam bagi pembentukan hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip Pancasila menekankan pentingnya integrasi antara pluralitas dan kesatuan, keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa, serta penghormatan terhadap hak-hak individu dan komunitas. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencakup nilai-nilai universal yang mengarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang beradab dan bermartabat, di mana segala bentuk penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan harus ditanggulangi (Safitri, 2021).

Selain itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki dimensi pragmatis yang sangat relevan dengan konteks sosial dan politik Indonesia. Sistem filsafat ini mendorong perwujudan cita-cita luhur negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, tanpa terlepas dari kenyataan sosial yang ada (Windari, 2021). Pancasila mengajarkan bagaimana nilai-nilai luhur dapat diterjemahkan dalam kebijakan publik yang adil dan bijaksana,

dengan selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Dalam praktiknya, Pancasila berfungsi sebagai landasan etis dalam pembuatan keputusan yang harus diambil oleh pemimpin negara dan masyarakat, serta sebagai panduan moral dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan konflik antar kelompok (Wijaya, 2024).

Pancasila sebagai etika

Pancasila sebagai etika dapat dipahami sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku individu dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar sesama warga negara maupun dalam interaksi dengan negara. Sebagai sistem etika, Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan (Wijaya, 2024). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila mengharuskan setiap warga negara untuk berperilaku dengan cara yang menghormati hak-hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan sosial, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan yang pluralistik. Etika Pancasila juga mengedepankan rasa tanggung jawab terhadap sesama dan negara, dengan menekankan pentingnya kerjasama dan saling menghormati dalam keberagaman. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan sosial secara normatif, tetapi juga memberi pedoman bagaimana individu dapat menjalankan hidup yang

bermartabat dalam konteks sosial yang lebih luas (Pramita et al., 2024).

Sebagai etika, Pancasila juga memberikan pedoman tentang hubungan antara negara dan warganya, di mana negara berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara diharapkan dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan kesejahteraan umum dan menghargai kebebasan serta martabat setiap individu (Windari, 2021). Di sisi lain, Pancasila juga menuntut warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengedepankan solidaritas sosial, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Etika Pancasila mendorong adanya kesadaran kolektif untuk bersama-sama menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, di mana setiap orang dapat hidup dengan aman dan damai, serta berkontribusi pada pembangunan negara.

Implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menghadapi perkembangan zaman

Implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika dalam menghadapi perkembangan zaman dapat dimulai dengan penerapan nilai-nilai dasar Pancasila dalam berbagai sektor kehidupan yang semakin kompleks (Alhudawi, 2023). Di era modern ini, dimana teknologi berkembang pesat dan globalisasi semakin meluas, Pancasila tetap relevan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan

publik yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam filsafat, Pancasila mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, sehingga di tengah arus perubahan zaman yang penuh dengan tantangan sosial dan ekonomi, prinsip-prinsip ini tetap menjadi acuan bagi pembangunan bangsa yang berkeadilan dan bermartabat (Safitri, 2021). Misalnya, dalam dunia digital, prinsip pertama Pancasila, yang menekankan pada ketuhanan, dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi untuk memajukan moralitas dan etika dalam masyarakat, serta menghindari penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak nilai-nilai kemanusiaan (Amri, 2018).

Pancasila sebagai etika juga memberikan pedoman penting dalam membangun karakter bangsa di tengah kemajuan teknologi dan pergeseran nilai budaya. Dalam masyarakat yang semakin plural, prinsip Pancasila mengharuskan kita untuk menjaga keberagaman dalam kebersamaan. Etika Pancasila menuntut setiap individu dan kelompok untuk menghormati perbedaan dan menjaga keharmonisan sosial, baik dalam interaksi sosial di dunia maya maupun nyata.

Hambatan dan Solusi yang di Hadapi

Dalam implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika, terdapat beberapa hambatan yang perlu dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Salah satu hambatan utama adalah

perubahan nilai-nilai sosial yang cepat, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur Pancasila (Wijaya, 2024). Globalisasi, dengan segala dampaknya, telah membawa arus budaya asing yang terkadang menggerus nilai-nilai kebangsaan dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, dalam kehidupan sosial yang semakin digital, kecenderungan individualisme dan konsumerisme bisa mengabaikan nilai gotong-royong, solidaritas, dan persatuan yang menjadi inti dari Pancasila. Selain itu, berkembangnya teknologi informasi juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga moralitas dan etika, di mana penyebaran informasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan polarisasi sosial dan ketegangan antar kelompok (Alhudawi, 2023).

Selain itu, tantangan besar lainnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih ada di Indonesia. Walaupun Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, kenyataan menunjukkan adanya jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, baik dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun peluang ekonomi (Syafira et al., 2024). Ketidakmerataan ini menjadi hambatan besar dalam mewujudkan cita-cita Pancasila, yang menginginkan terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur (Amri, 2018). Dalam sektor pemerintahan dan politik, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga sering menjadi masalah yang menghambat realisasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai etika politik, Pancasila

menuntut adanya pemerintahan yang bersih dan transparan, tetapi kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan praktik-praktik yang berlawanan dengan prinsip keadilan dan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Pramita et al., 2024).

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan ini harus melibatkan pendekatan yang efektif, baik dalam sektor pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial. Di bidang pendidikan, implementasi nilai-nilai Pancasila harus ditingkatkan dengan cara mengintegrasikan pendidikan karakter secara lebih menyeluruh dalam kurikulum (Safitri, 2021). Hal ini mencakup pendidikan tentang pentingnya keberagaman, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter melalui pengajaran Pancasila dapat dilakukan dengan metode yang lebih kontekstual dan relevan, sehingga para siswa tidak hanya memahami prinsip-prinsipnya secara teori, tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Kesimpulan

Pancasila, sebagai sistem filsafat dan etika, memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga identitas bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang dinamis. Sebagai dasar negara dan pedoman moral, Pancasila menawarkan nilai-nilai yang relevan untuk menghadapi berbagai tantangan

kontemporer, seperti individualisme, ketimpangan sosial, dan degradasi moral. Namun, penerapannya seringkali menghadapi kendala, baik dalam aspek pemahaman maupun pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan pendidikan karakter yang berbasis Pancasila, formulasi kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab

Daftar Pustaka

- Alhudawi, U. (2023). Filsafat Pancasila Dalam Perkembangan Teknologi. *Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 26-32.
- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, 8(01), 760-768.
- Pramita, S., Salminawati, S., Dayantri, M. N., & Syahputra, T. A. (2024). Filsafat Pendidikan Pancasila dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Journal on Education*, 6(2), 11038-11050.
- Safitri, R. (2021). Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *OSF Preprints*, 1-18.

Syafira, A., Fitri, M., Ramadanisa, A. N., & Olivia, E. (2024). PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(4), 5012-5015.

Wati, E., Sauki, A., Hafizzudin, A., & Nisa, K. (2024). Pancasila sebagai Sistem Filsafat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(3), 113-120.

Wijaya, R., Conary, J., Stevani, C., Di Matteo, M., & Tumanggor, R. O. (2024). GAMBARAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT TERHADAP DINAMIKA SOSIAL DI INDONESIA. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 581-586.

Windari, S., & Aziz, M. I. (2021). Filsafat dalam sistem nilai Pancasila. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 9-15.

Wulandari, V., Amelia, S., Murniati, Y., Arifin, K., & Trisno, B. (2024). KONSEP DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 829-835